

# E-GOVERNMENT DAN BASIS DIGITAL SEBAGAI SOLUSI UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR PEMERINTAHAN

Yosua Apriando Siallagan<sup>1</sup>, M. Reyhan Aditia<sup>2</sup>, Sindy Widia Lingga<sup>3</sup>

Hani Tri Handayani<sup>4</sup>, Dani Himvaldo H. Sirait<sup>5</sup>, Kevin R.R Pasaribu<sup>6</sup>

Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum

<sup>1</sup> [yosuaapriandosiallagan@gmail.com](mailto:yosuaapriandosiallagan@gmail.com)

<sup>2</sup> [reyhanaditia4@gmail.com](mailto:reyhanaditia4@gmail.com)

<sup>3</sup> [sindiwidialingga@gmail.com](mailto:sindiwidialingga@gmail.com)

<sup>4</sup> [hanitrihandayani0@gmail.com](mailto:hanitrihandayani0@gmail.com)

<sup>5</sup> [siraitd530@gmail.com](mailto:siraitd530@gmail.com)

<sup>6</sup> [kevinpasaribu046@gmail.com](mailto:kevinpasaribu046@gmail.com)

## *Abstract*

E-government, e-procurement, blockchain, and big data analytics have significant potential in increasing government transparency and accountability in efforts to eradicate corruption in Indonesia. Initiatives such as Open Data and whistleblowing systems also play an important role in monitoring and reporting corrupt practices. Although e-government offers opportunities to reduce levels of corruption, its success is greatly influenced by various factors, including the level of democracy, the crisis at hand, and political will. Indonesia still faces a number of challenges in implementing e-government, such as the need for supportive regulations and adequate infrastructure development. Therefore, collaboration between government and society as well as system integration between regional and central governments are the keys to achieving optimal results in anti-corruption efforts.

**Keywords:** *E-Government, Tranparency, Corruption, Accountability, Open data*

## *Abstrak*

E-government, e-procurement, blockchain, dan big data analytics memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Inisiatif seperti Open Data dan sistem whistleblowing juga memainkan peran penting dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi. Meskipun e-government menawarkan peluang untuk mengurangi tingkat korupsi, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat demokrasi, krisis yang dihadapi, dan kehendak politik. Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi e-government, seperti kebutuhan akan regulasi yang mendukung dan pengembangan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta integrasi sistem antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya anti-korupsi.

**Kata kunci:** *E-Government, Transparansi, Korupsi, Akuntabilitas, Open Data*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu masalah besar yang menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah korupsi. Pemerintah harus mengambil pendekatan baru dan berhasil untuk menghilangkan korupsi. Teknologi digital mungkin dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. E-government, e-procurement, blockchain, dan big data analytics adalah beberapa teknologi yang dapat memperkuat sistem pengawasan dan meminimalkan peluang korupsi. Terdapat kemajuan dalam penggunaan teknologi ini, tetapi masalah seperti regulasi yang tidak memadai dan infrastruktur yang tidak memadai masih menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah dan masyarakat serta integrasi sistem pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam upaya anti-korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menekankan pentingnya perubahan budaya dan undang-undang, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang cara menggunakan teknologi digital untuk memerangi korupsi di Indonesia.

Korupsi adalah masalah besar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Tantangan budaya dan pembagian kekuasaan terus menghalangi pemberantasan korupsi, meskipun peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2018. Diharapkan bahwa penerapan e-government, e-procurement, dan teknologi informasi lainnya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dalam konteks ini. Konsep e-government juga menawarkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif mengawasi dan melaporkan praktik korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi, berbagai langkah strategis telah diambil, termasuk sistem whistleblowing dan Open Data. Namun, keberhasilan penerapan e-government sangat bergantung pada hal-hal seperti tingkat demokrasi, situasi krisis, dan keinginan politik. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur yang memadai serta kolaborasi pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya anti-korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran teknologi dalam memerangi korupsi serta bagaimana penerapan

e-government dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah

Mengingat dampaknya yang luas terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, korupsi adalah masalah yang sangat mendesak di Indonesia. Korupsi merusak ekonomi negara dan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tantangan budaya dan pembagian kekuasaan masih ada, dan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan harus diubah. Dalam hal ini, teknologi informasi dan komunikasi—khususnya e-government—muncul sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Namun, keberhasilan penerapan e-government sangat bergantung pada sejumlah hal, termasuk tingkat demokrasi, krisis yang dihadapi, dan keinginan politik. Karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana teknologi dapat digunakan untuk melawan korupsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengutamakan analisis literatur mengenai dampak e-government terhadap pemberantasan korupsi. Data dikumpulkan melalui penelitian pustaka dari berbagai sumber, termasuk artikel, laporan, dan jurnal yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai konsep, teori, dan temuan penelitian sebelumnya tentang e-government dan korupsi. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan konteks budaya, politik, dan ekonomi Indonesia yang memengaruhi seberapa efektif e-government dalam memerangi korupsi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang ada saat menggunakan e-government sebagai strategi anti-korupsi di Indonesia. Analisis ini akan disajikan dalam narasi yang menggambarkan bagaimana teknologi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik berhubungan satu sama lain.

Selain itu, analisis dokumen akan dilakukan terhadap kebijakan pemerintah dan laporan terkait penerapan teknologi digital

dalam pemerintahan. Dokumen-dokumen ini akan memberikan konteks yang lebih luas mengenai regulasi dan strategi yang telah diterapkan untuk memerangi korupsi. Peneliti akan mengkaji bagaimana kebijakan tersebut mendukung atau menghambat penggunaan teknologi dalam meningkatkan integritas di sektor pemerintahan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas teknologi digital sebagai alat untuk mencegah korupsi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi teknologi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat integritas dan transparansi di sektor pemerintahan.

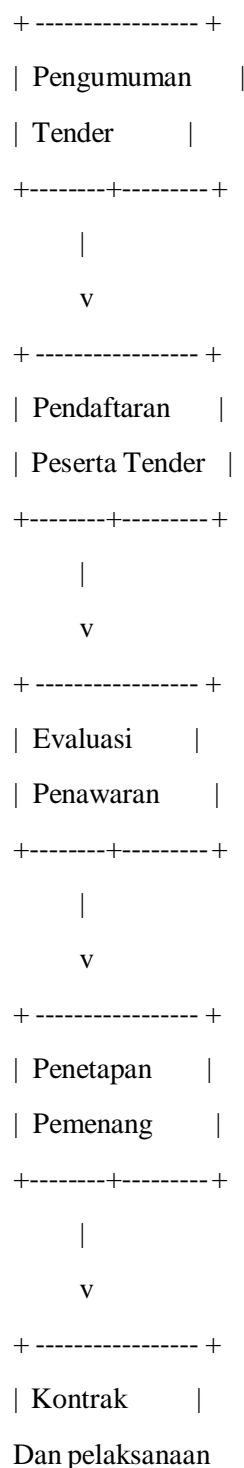
## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh E-Government terhadap Pencegahan Korupsi:  
E-Government dapat membantu mencegah korupsi. Sistem ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan dan pengelolaan anggaran. Hubungan antara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dan tingkat penerapan E-Government ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tahun	Tingkat Penerapan E-Government	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
2016	Rendah	36
2017	Sedang	37
2018	Tinggi	38
2019	Tinggi	40
2020	Sangat Tinggi	42

|  
+-----+ Bagan Proses E-Procurement

Bagan berikut menggambarkan proses E-Procurement yang dapat membantu dalam pencegahan korupsi:



penerapan E-Government dan E-Procurement sangat penting untuk mencegah korupsi di Indonesia. Meskipun implementasi E-Government menantang, seperti kompleksitas faktor politik dan budaya, transformasi budaya dan pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi, adalah

penting untuk memastikan bahwa ia berhasil mencegah korupsi. Peran teknologi, terutama TI dan komunikasi, dalam memerangi korupsi di Indonesia. Teknologi dapat membuat proses pemerintahan lebih transparan dan akuntabel, terutama dalam pengadaan publik. Mereka berpendapat bahwa dengan membuat proses lebih mudah dan lebih efisien, penggunaan e-government dan e-procurement dapat membantu mencegah korupsi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa alat digital sangat penting untuk mencegah dan menuntut korupsi dan menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah mengurangi tingkat korupsi. Studi ini menemukan bahwa upaya komprehensif yang melibatkan teknologi dan partisipasi publik sangat penting untuk tindakan anti-korupsi yang berhasil.

Tabel 1: Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemberantasan Korupsi

No	Jenis Teknologi	Deskripsi Penggunaan	Dampak yang Diharapkan
1	E-Government	Layanan publik secara online	Meningkatkan transparansi
2	E-Procurement	Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Mengurangi KKN
3	Digital Forensic	Analisis bukti digital dalam kasus korupsi	Meningkatkan akurasi bukti
4	Sistem Informasi Manajemen	Pengelolaan data dan informasi pemerintah	Efisiensi dalam pengambilan keputusan

Penerapan teknologi informasi, seperti e-government dan e-procurement, berkontribusi

signifikan dalam pemberantasan korupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya public

Meskipun kemajuan dalam meningkatkan layanan publik melalui penggunaan TIK, penerapan e-government di Indonesia masih belum optimal. Tidak ada komitmen dari para pemangku kepentingan, penerapan TIK yang tidak merata, dan kurangnya kemampuan sumber daya manusia adalah masalah utama yang dihadapi. Terlepas dari fakta bahwa hampir semua lembaga pemerintah memiliki portal layanan, penggunaan TIK masih sangat rendah dan seringkali bergantung pada data sekunder. Indonesia belum mengintegrasikan layanan e-government seperti negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kebijakan saat ini belum diterapkan secara menyeluruh, dan banyak layanan masih menggunakan sistem manual. Studi ini menekankan bahwa kebijakan TIK yang tepat harus diterapkan, penggunaan TIK oleh masyarakat dan lembaga pemerintah harus dipromosikan, dan proyek TIK yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sektor publik. Mengadopsi prinsip-prinsip Open Government Partnership (OGP) seperti transparansi, keterlibatan publik, dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan tingkat demokrasi dan partisipasi publik dalam pemerintahan. E-Government, model baru dalam pelayanan publik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). E-Government didefinisikan sebagai penerapan TIK oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan layanan kepada warga dan bisnis, mengurangi korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas. Menurut penelitian ini, ada lima tahapan e-government, mulai dari penyediaan data statis hingga integrasi total antara orang, bisnis, dan pemerintah. Selain itu, paradigma baru dalam pelayanan publik, yang disebut New Public Service (NPS), menegaskan bahwa pelayanan publik harus sederhana, jelas, terbuka, efisien, ekonomis, adil, dan bermutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Government tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta memperbaiki hubungan antara pemerintah dan

masyarakat. Melalui interaksi yang lebih baik antara pemerintah dan warga (G2C), pemerintah dan bisnis (G2B), dan antar lembaga pemerintah (G2G), e-Government juga berkontribusi pada peningkatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

### 1. Tabel Manfaat e-Government

Dimensi	Manfaat
Ekonomi	- Mengurangi biaya transaksi
	- Meningkatkan kapasitas respon terhadap isu kemiskinan
	- Meningkatkan pendapatan
Sosial	- Penciptaan lapangan kerja
	- Peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan
Pemerintahan	- Peningkatan keselamatan dan keamanan
	- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
	- Mengurangi korupsi

Implementasi e-Government meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat, yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penggunaan Open Government Data (OGD) di Indonesia dapat membantu meningkatkan transparansi publik dan mengurangi korupsi. Terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk memerangi korupsi, hasilnya masih dianggap tidak memuaskan. Ada bukti bahwa penerapan open data dapat meningkatkan pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Studi ini membandingkannya dengan praktik di negara lain seperti Seoul dan Brasil. Misalnya, di Seoul, program OGD, yang dimulai pada tahun 1998, berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah, meskipun ada kritik mengenai kredibilitas data. Meskipun transparansi pemerintah telah berkembang, partisipasi masyarakat dan akses

teknologi masih menjadi masalah di Brasil. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam memerangi korupsi, penerapan OGD memerlukan kolaborasi pemerintah dan masyarakat serta infrastruktur yang memadai. Penelitian lebih lanjut diperlukan agar inisiatif OGD di Indonesia dapat dibandingkan dengan yang ada di negara lain.

**Tabel 1: Trend Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Kasus	448	436	401	560	629
Kerugian Negara (dalam triliun rupiah)	3.3	2.1	10.4	7.3	5.3
Jumlah Tersangka	1157	1053	877	1271	1328

Sumber: (ICW, Trend Pemberantasan Korupsi, 2013) & (ICW, Trend Pemberantasan

Korupsi 2014. Retrieved from Jakarta: Index, C. P. (2010). Transparency International, 2014)

Dari Tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa pemberantasan korupsi sejak 2010 menunjukkan peningkatan dari sisi kualitas dan kuantitas. Namun disisi lain, data diatas juga dapat diartikan bahwa dari tahun ke tahun korupsi tidak juga berkurang, malah menunjukkan peningkatan. Sementara untuk tahun 2015, “KPK melakukan penyelidikan 84 perkara, penyidikan 50 perkara, penuntutan 58 perkara, inkracht 32 perkara, dan eksekusi 33 perkara.” (Portal pengetahuan anti korupsi, 2015).

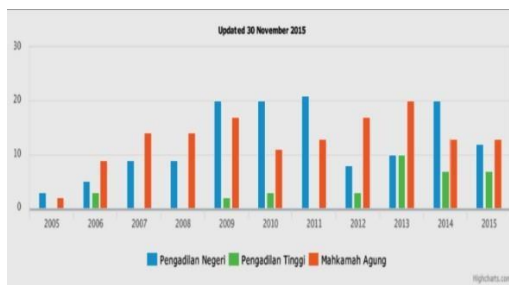
Lebih lanjut, dari Gambar 1 berikut, diperlihatkan sektor mana saja yang rentan untuk dijadikan “bancakan” para koruptor. Dari data Indonesia Corruption Watch tahun 2013 dan 2014, sektor infrastruktur, keuangan daerah dan pendidikan merupakan tiga besar sektor paling rawan korupsi, dengan masing-masing 380, 282, dan 131 kasus.



Gambar 1 Korupsi Berdasarkan Sector

Sumber: (ICW, Trend Pemberantasan Korupsi, 2013) & (ICW, Trend Pemberantasan

Korupsi 2014. Retrieved from Jakarta: Index, C. P. (2010). Transparency International, 2014)



Gambar 2 Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi di Indonesia (Anonim, 2015)

Disisi lain, dari Gambar 2 diatas, kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri lebih mendominasi jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang di tangani oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung melakukan penyelidikan hampir 12% kasus korupsi, 11% penyelidikan di Pengadilan Negeri dan 8% di Pengadilan Tinggi.

Jika dibandingkan dengan negara lain, maka Indonesia memiliki ranking yang cukup buruk untuk penanganan korupsi. Data kuantitatif yang dihasilkan dari survey oleh beberapa lembaga independen menunjukkan kenyataan yang memprihatinkan. Negara yang mempunyai Indeks Prestatasi Kumulatif tertinggi dimiliki oleh Denmark, Selandia Baru dan Singapura. Masing-masing negara meraih IPK 9,3. Sedangkan negara yang tingkat korupsi tertinggi atau terkorup adalah Somalia

dengan nilai (IPK 1,1), kemudian Myanmar (IPK 1,4), Afghanistan (IPK 1,4). Sementara Indonesia berada pada tingkat ke-5 untuk ukuran Asia Tenggara dengan (IPK 3,5), berada dibawah Thailand (IPK 3,5), Malaysia (IPK 4,4) Brunei Darussalam (IPK 5,5) dan Singapura (IPK 9,3) (Kurniawan, 2011).

Situasi budaya, politik, dan ekonomi sangat penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) meningkat pada tahun 2018, masalah budaya dan pembagian kekuasaan masih ada. Digariskan bahwa perubahan paradigma dan budaya dalam tata kelola pemerintahan sangat penting untuk memungkinkan generasi muda menjadi agen perubahan. Selain itu, artikel ini mengidentifikasi berbagai tindakan korupsi yang diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menekankan betapa pentingnya mencegah korupsi melalui pendekatan hukum, sosial, dan ekonomi. Konsep e-government dianggap sebagai inovasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, meskipun tantangan seperti kesenjangan digital dan keamanan siber harus diatasi. Namun, e-government memerlukan perubahan dalam regulasi dan budaya, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar lebih efektif. peran teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, dalam memerangi korupsi di Indonesia. Penulis menekankan bahwa teknologi memiliki kemampuan untuk membuat proses pemerintahan lebih jelas dan adil, terutama dalam hal pengadaan publik. Mereka berpendapat bahwa penggunaan e-government dan e-procurement dapat membantu mencegah korupsi dengan mempersederhanakan dan mempercepat prosedur. Kemajuan teknologi telah mengurangi korupsi, dan alat digital sangat penting untuk mencegah dan menuntut kasus korupsi. Dengan mendorong penggunaan sistem elektronik di semua tingkat pemerintahan untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. E-government adalah salah satu bagian dari reformasi administrasi publik di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Meskipun kemajuan telah

dicapai dalam penyediaan layanan e-government, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti administrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang terbatas, dan kurangnya integrasi antar instansi. Inisiatif Open Government Indonesia (OGI) berfokus pada transparansi dan partisipasi publik. Namun, kekurangan dana dan kekurangan sumber daya manusia menghambatnya. E-government belum sepenuhnya diterapkan, jadi banyak lembaga pemerintah masih menggunakan sistem manual. Studi ini menunjukkan betapa pentingnya membuat kebijakan TIK yang tepat untuk meningkatkan layanan publik. Selain itu, penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Upaya untuk mengubah pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dikenal sebagai e-government. E-government terdiri dari lima tahap, yang dimulai dengan penampilan informasi statis di website dan berakhir pada integrasi, yang melibatkan kerja sama bisnis, masyarakat, dan pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Konsep ini sejalan dengan paradigma "The New Public Service", yang menekankan hal-hal seperti keadilan, kesederhanaan, dan kejelasan serta pelayanan kepada warga dan kepentingan publik. Secara keseluruhan, diharapkan e-government dapat meningkatkan interaksi antara pemerintah dan pemangku kepentingan, menjadikannya model pelayanan publik yang lebih modern dan efektif. Ini disebabkan oleh fakta bahwa e-government berfokus pada hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan lembaga pemerintah. karakteristik pemerintahan yang baik, menurut Mardiasmo (2009), dan bagaimana penerapan Open Government Data (OGD) dapat membantu memerangi korupsi di Indonesia. Baik pemerintahan memiliki karakteristik seperti efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas, yang semuanya memerlukan reformasi kelembagaan dan manajemen publik. Tinjauan pustaka digunakan untuk menilai kontribusi open data dalam memerangi korupsi. Studi kasus ini dilakukan di Seoul, Korea Selatan, dan Brasil. Brasil telah menggunakan OGD, tetapi

menghadapi masalah dengan penggunaan teknologi dan akses informasi.

Di sisi lain, di Seoul, sistem OGD berhasil meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi, meskipun kritik terhadap keakuratannya. Kesimpulannya, adopsi open data diharapkan dapat mendorong pemerintahan yang baik di Indonesia dengan meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Namun, infrastruktur yang memadai dan kolaborasi pemerintah-masyarakat diperlukan untuk mencapai hasil terbaik. E-government memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemerintahan dengan mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Pemerintah kepada rakyat (G2C), pemerintah kepada bisnis (G2B), pemerintah kepada pemerintah (G2G), dan pemerintah kepada karyawan (G2E) adalah empat model utama e-government. Proses pengembangan e-government mencakup langkah-langkah mulai dari publikasi informasi dasar hingga integrasi layanan ke dalam satu platform. Di Indonesia, e-government menghadapi tantangan seperti kekurangan peraturan dan sumber daya manusia, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi korupsi. Di negara lain, seperti India dan Korea Selatan, e-government berhasil meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi, tetapi Indonesia masih perlu mengembangkan kapasitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk memaksimalkan manfaatnya. kemampuan teknologi untuk berkembang dengan cepat dan relevansinya untuk meningkatkan efisiensi layanan publik di era komputer dan internet. Peran pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan penyediaan layanan sesuai dengan kerangka hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Layanan Publik Indonesia (UU No. 25 Tahun 2009). Digitalisasi dianggap penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, termasuk penggunaan aplikasi mobile dan e-government untuk mempermudah akses ke informasi dan layanan. Pergeseran menuju model layanan publik yang berfokus pada pelanggan dengan memanfaatkan alat digital yang meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting. Layanan publik diharapkan menjadi lebih

responsif, efektif, dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan penggunaan teknologi digital. Hasil e-government terhadap korupsi dengan melihat literatur. E-government dianggap sebagai alat yang menguntungkan untuk memerangi korupsi karena meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga. Informasi pemerintah yang lebih mudah diakses dapat mengurangi kemungkinan korupsi dengan mengurangi ketidaksamaan informasi. Namun, seberapa efektif e-government dalam mengurangi korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti krisis, tingkat demokrasi, ideologi yang diperbarui, dan keinginan politik. Faktor ekonomi, politik, dan budaya suatu negara dapat memengaruhi e-government. Namun, e-government dapat meningkatkan transparansi institusi politik dan hukum serta memudahkan interaksi langsung antara warga dan pemerintah. Secara keseluruhan, e-government dapat menjadi strategi yang berguna untuk memerangi korupsi; namun, keberhasilannya bergantung pada struktur pemerintahan saat ini dan situasi tertentu. Teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi. Beberapa teknologi yang dibahas termasuk e-government, open data, blockchain, big data analytics, system whistleblowing, e-procurement, dan sistem pembayaran digital. Teknologi ini diharapkan dapat mengurangi korupsi di sektor pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah. menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang seberapa baik pemerintah memerangi korupsi. Pada tahun 2017, persentase ini meningkat menjadi 64% dari 16% pada tahun 2013. Untuk meningkatkan efektivitas ini, pemerintah harus memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan literasi digital, dan mendorong partisipasi publik dalam proses pemerintahan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Teknologi digital seperti e-government, e-procurement, blockchain, dan big data analytics memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Meskipun ada kemajuan, masalah seperti regulasi yang tidak memadai dan infrastruktur yang tidak memadai masih

menjadi hambatan. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat dengan lebih erat dan mengintegrasikan sistem antara pemerintah daerah dan pusat. Salah satu saran yang dapat diberikan adalah perubahan aturan dan budaya yang diperlukan. Selain itu, masyarakat harus lebih menyadari manfaat teknologi dalam memerangi korupsi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan teknologi untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.



## DAFTAR PUSTAKA

- Darusalam, D., & Praditya, D. (2017). Open Government Data Sebagai Inisiatif Anti-korupsi di Indonesia: A Cross-Country Comparison. *JUSIFO (Jurnal Sistem Informasi)*, 3(1), 1-14.
- Gultom, M. F., Simanjuntak, L., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government). *SYARIAH*:
- Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435-452.
- Irawan, B. (2017). E-Government Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. *Jurnal Paradigma (JP)*, 4(3), 200-209.
- Laming, R. F., Anwar, A. I., Rahmi, S., & Soumena, F. Y. (2023). Pengaruh e-government terhadap Pemberantasan Korupsi: Systematic Negara, 2(4), 321-334.
- Literatur Review. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 97-106.
- Nurdin, A. H. M. (2018). Menuju pemerintahan terbuka (open government) melalui penerapan e-government. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 5(1), 1-17.
- Paretanan, E., Darwis, W., Darwis, W., Barung, D. U. L., Putri, N. L., Intan, R., & Rome, M. (2021). PERAN TEKNOLOGI BERBASIS GADGET DALAM MEMBERANTAS KORUPSI. *PROSIDING UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA*, 1(1), 189-192.
- Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 748-754.
- Wulandari, M., Aprilla, W., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*.